

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum SMA Negeri 2 Majalengka**

SMAN 2 Majalengka merupakan Sekolah Menengah Atas yang menjadi tempat penelitian. SMA tersebut terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2, Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Lokasi SMAN 2 Majalengka sangat strategis dan terletak di tengah kota, jaraknya hanya 190 meter saja dari alun-alun Kabupaten Majalengka.

SMAN 2 Majalengka berada di lingkungan perkotaan dan dekat dengan kantor pemerintah kabupaten yang dibangun pada tahun 1901. Dahulu, gedung sekolah ini adalah gedung tinggi dan megah yang merupakan sekolah milik Belanda yang bernama HIS (Holland Indische School) kalau sekarang setingkat dengan Sekolah Dasar. Pada tahun 1959 berubah menjadi SR (Sekolah Rakyat) dan tahun 1959 diganti kembali menjadi SGB (Sekolah Guru B). SGB ini kemudian dikembangkan menjadi SGA (Sekolah Guru A) sampai tahun 1965. Lalu, dari tahun 1966 sampai dengan 1991 disempurnakan menjadi SPGN (Sekolah Pendidikan Guru Negeri). Mulai 15 Juli tahun 1991 sekolah kejuruan ini beralih fungsi menjadi sekolah umum yang diberi nama SMAN Ahmad Yani. Dan pada tahun 1992 namanya diganti menjadi SMAN 2 Majalengka. Meski pada tahun 1994, SMA ini berubah nama kembali menjadi SMUN 2 Majalengka, tetapi pada tahun 2003 hingga sekarang SMA ini kembali diubah menjadi SMAN 2 Majalengka

karena disesuaikan dengan Sistem Pendidikan Nasional UU nomor 20 tahun 2003.

SMAN 2 Majalengka memiliki 2 jurusan, yaitu MIPA dan IPS. Di masing-masing angkatan, siswa-siswi dibagi ke dalam 12 kelas setiap peminatannya, sehingga rata-rata selama satu tahun pembelajaran terdapat 36 ruang kelas.

Bangunan yang terdapat di SMAN 2 Majalengka terdiri dari 36 ruang kelas, 1 ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, perpustakaan, ruang BK, ruang operator, ruang tata usaha, ruang rapat, ruang tamu, mushola, dapur sehat, kantin sekolah, lapangan, aula, laboratorium komputer, laboratorium serbaguna (biologi, kimia dan fisika) dan toilet.

Di SMAN 2 Majalengka sendiri terdapat beberapa program kesiswaan dan ekstrakurikuler seperti OSIS, PMR, Paskibra, *marching band*, *Smandaka computer club*, dan basket.

Sekolah ini adalah salah satu sekolah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, sesuai yang sudah diinstruksikan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka nomor 4 tahun 2021 mengenai Kawasan Tanpa Rokok, dimana salah satu tempat pelaksanaannya yaitu pada tatanan sekolah.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Komunikasi

#### a. Transmisi

Transmisi yang diteliti dalam penelitian ini yaitu adanya keselarasan informasi yang disampaikan mengenai Kawasan Tanpa Rokok antara pimpinan sekolah, guru/staf sekolah, dan siswa/i.

Berdasarkan hasil wawancara kepada wakil kepala sekolah, didapatkan hasil bahwa Kawasan Tanpa Rokok merupakan program yang bertujuan untuk mencegah adanya penyakit-penyakit seperti jantung dan lainnya. Hal tersebut kemudian ditambahkan oleh keterangan dari guru BK, kepala UKS dan wali kelas yang menyebutkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok merupakan kawasan yang didalamnya tidak ada aktivitas merokok dan dilarang untuk merokok.

IK1 : “.....tujuannya untuk mencegah adanya penyakit-penyakit seperti jantung dan lainnya.....” IU1 : “.....Kawasan Tanpa Rokok itu, tidak ada yang merokok, tidak ada asap rokok” IU2 : “Kawasan Tanpa Rokok berarti di kawasan itu tidak, tidak ada aktivitas merokok....” IU3 : “Kawasan Tanpa Rokok, adalah suatu wilayah dimana orang dilarang merokok, juga menjual....”
---

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa aspek transmisi komunikasi dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok sudah baik dan sesuai yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya keselarasan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

b. Kejelasan

Kejelasan dalam penelitian ini berupa ada tidaknya sosialisasi atau penyuluhan mengenai Kawasan Tanpa Rokok kepada internal karyawan sekolah.

Hasil wawancara kepada wakil kepala sekolah, didapatkan bahwa sosialisasi kepada karyawan sekolah dilakukan secara langsung melalui rapat dan secara tertulis melalui imbauan tertulis yang berada di ruang guru. Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan guru BK.

IK1 : “Ya sudah. Bisaanya melalui rapat atau himbauan tertulis...” IU1: “Oh itu pernah tapi hanya perwakilan saja tidak secara keseluruhan guru dan staf ikut dalam rapat itu. Kebetulan dari BK itu ada Bu Ani. Tapi itu sekalian dengan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja gitu.”
---

Berdasarkan jawaban dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek kejelasan dalam komunikasi ini sudah baik, karena Kawasan Tanpa Rokok sudah tersosialisasikan kepada karyawan sekolah melalui rapat atau *briefing*. Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok kepada internal karyawan tidak diagendakan secara khusus, namun disampaikan hanya sekali pada satu waktu itu saja, itupun hanya kepada perwakilan dari guru dan staf saja tidak secara keseluruhan.

c. Konsistensi

Konsistensi yang diteliti dalam penelitian ini berupa ada tidaknya kebijakan tertulis mengenai Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 2 Majalengka.

Hasil wawancara kepada wakil kepala sekolah, didapatkan bahwa sudah terdapat kebijakan tertulis yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok, namun hanya dalam bentuk tata tertib. Kemudian, hal tersebut juga ditambahkan oleh keterangan dari kepala UKS dan wali kelas bahwa, kebijakan tertulis sudah ada dan tercantum dalam program Sekolah Ramah Anak (SRA).

<p>IK1 : "...Di depan ruang guru itu ada. Nah kalau untuk siswa kita ada di tata tertib."</p> <p>IU2 : "...pernah dipasang kurang lebih larangan atau himbauan untuk tidak merokok. Pernah iya, pernah liat dalam salah satu program SRA (Sekolah Ramah Anak)."</p> <p>IU3 : "Kawasan Tanpa Rokok ya ada karena kita sekolah ramah anak. Itu ada sebenarnya."</p>
---

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa aspek konsistensi berupa ada tidaknya kebijakan tertulis yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok ini sudah terlaksana dengan baik.

Hal tersebut juga diperkuat dengan temuan hasil telaah dokumen tata tertib siswa, tata tertib pegawai, dan buku panduan Sekolah Ramah Anak. Dalam tata tertib guru dan siswa, kebijakan tertulis yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok hanya berupa larangan untuk merokok beserta poin pelanggaran untuk siswa/i yang merokok. Kemudian, dalam dokumen Sekolah Ramah Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di adopsi oleh SMAN 2 Majalengka, bahwa sekolah harus berkomitmen untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan anjuran

untuk membuat simbol/tanda terkait dengan Sekolah Ramah Anak (SRA) di sekolah, salah satunya yaitu tanda larangan untuk merokok.

Dalam tata tertib siswa ditemukan bahwa adanya larangan membawa rokok, menyimpan rokok di lingkungan sekolah (20 dan 25 poin pelanggaran) dan larangan menghisap rokok di lingkungan sekolah (30 dan 50 poin pelanggaran).
--

Dalam tata tertib guru di temukan poin 18 yang salah satunya berisi larangan untuk merokok selama berada di lingkungan satuan pendidikan.
---

Terdapat panduan Sekolah Ramah Anak di SMAN 2 Majalengka yaitu berupa panduan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang salah satu poin didalamnya yaitu adanya komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok dan anjuran untuk dibuaya simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA di sekolah (misal: simbol - dilarang merokok, dilarang <i>bullying</i> ; tanda – titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas, dll). Kemudian di SMAN 2 Majalengka sendiri sudah mulai menerapkan hal tersebut yang dapat dibuktikan melalui adanya dokumen rencana program SRA di SMAN 2 Majalengka, dimana salah satu programnya yaitu Melengkapi simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA: Plank SRA, simbol - dilarang merokok, dilarang <i>bullying</i> , tanda – titik berkumpul, dan ada sumber air.
---

## 2. Sumber Daya

### a. Staf

Staf yang diteliti dalam penelitian ini berupa ada tidaknya tim pelaksana Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 2 Majalengka.

Hasil wawancara kepada wakil kepala sekolah, didapatkan bahwa sudah ada tim pelaksana Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 2 Majalengka yaitu tim sama yang mengkoordinir Sekolah Ramah Anak (SRA), namun memang belum di sah kan secara tertulis. Hal tersebut pun ditambahkan oleh keterangan dari kepala UKS dan salah satu

siswa yang mengatakan bahwa tim pelaksana Kawasan Tanpa Rokok itu terdiri dari wakasek, kesiswaan, BK dan OSIS.

IK1 : “*Eee*, kita bersatunya sama sekolah ramah anak. Karena kan di sekolah ramah anak itu ada beberapa kebijakan ya seperti tidak bullying, bebas rokok, melaksanakan kantin sehat nah itu masuk kriteria.”  
 IU2 : “Nah kalau tim khusus itu untuk siswa yang kedapatan merokok, kalau ada laporan merokok, entah itu di kamar mandi, itu ada aturannya ya dari wakasek dan kesiswaan, dan OSIS gitu.”  
 IT6 : “Ya pernah teh, *eee* terus sanksinya tuh yang pertama masuk ruang kesiswaan lalu di teruskan ke ruang BK, kesiswaan dan BK tuh kayak bekerja sama gitu dalam menangani kasus ini....”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa aspek staf sudah terpenuhi meski belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya guru/staf yang ditunjuk untuk berperan serta dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok seperti memantau, menegur, memberikan sanksi dan mencatat perokok dari siswa/i.

#### b. Informasi

Informasi yang diteliti dalam penelitian ini berupa ada tidaknya penyuluhan Kawasan Tanpa Rokok, bahaya merokok dan tidak merokok di lingkungan sekolah.

Hasil wawancara kepada wakil kepala sekolah, didapatkan bahwa penyuluhan/sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok pada warga sekolah dilakukan secara langsung melalui upacara yang dilakukan di hari senin namun hanya kadang-kadang saja tidak secara rutin dan eksplisit. Hal tersebut pun ditambahkan oleh keterangan dari guru BK

dan wali kelas bahwa, penyuluhan/sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok pada warga sekolah juga sering dilakukan secara langsung melalui rapat/*briefing* tertentu selain pada forum upacara itu.

IK1 : “Iya suka, ke anak-anak, melalui upacara, di rapat-rapat, kalau hari senin di ingatkan. Namun tidak secara rutin, kadang-kadang aja.”  
 IU1 : “...itu sering dilakukan pada saat upacara biasanya, jadi biasanya ke siswa lebih sering, kalau ke guru itu biasanya sama kepala sekolah karena masuknya itu ke disiplin pegawai ya. Lalu ketika rapat juga biasanya diingatkan....”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa aspek informasi ini sudah baik karena sudah ada penyuluhan/sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah pada warga sekolah melalui upacara hari senin dan di beberapa agenda rapat..

#### c. Wewenang

Wewenang yang diteliti dalam penelitian ini ada dua aspek yaitu ada tidaknya guru/staf yang memantau, menegur serta memberikan sanksi terhadap pelanggar Kawasan Tanpa Rokok dan ada tidaknya guru/staf yang ditugaskan untuk mencatat pelanggaran terhadap Kawasan Tanpa Rokok.

Hasil wawancara kepada wakil kepala sekolah, didapatkan bahwa terdapat staf sekolah/guru yang memantau, menegur dan memberikan sanksi kepada perokok di sekolah antara lain dari kesiswaan dan pimpinan sekolah. Hal tersebut pun ditambahkan oleh keterangan dari kepala UKS bahwa, staf sekolah/guru yang

memantau, menegur dan memberikan sanksi kepada perokok di sekolah selain kesiswaan dan pimpinan sekolah juga ada dari wakasek dan OSIS. Sanksi yang diberikan berupa teguran, pemanggilan siswa keruang kesiswaan dan BK, hingga pemanggilan orang tua.

IK1 : “Ada, bagian kesiswaan biasanya, tapi pimpinan sekolah juga. Tapi kita juga tidak melanggar etika sesama guru ya neng, paling secara halus saja gitu. Tidak dengan kekerasan, tapi dengan imbauan atau peringatan lah minimal. Terus di arahkan juga ke tempat seharusnya, minimal tidak terlihat oleh siswa lah karena itu contoh yang tidak baik ya. Kalau untuk siswa ada, untuk sanksinya itu satu diberikan teguran dulu, yang kedua nanti orang tuanya dipanggil ketika melakukan lagi, nah kalau udah sampai 100 poin kita kembalikan ke orang tua lagi biar ada jeranya gitu, dan sampai perjanjian di atas materai.”  
 IU2 : “....siswa yang kedapatan merokok, kalau ada laporan merokok, entah itu di kamar mandi, itu ada aturannya ya dari wakasek dan kesiswaan, dan OSIS gitu. Kalau untuk guru secara pribadi saja suka mengingatkan gitu ya jangan merokok..... Sanksinya itu ditegur, dipanggil, di poin, akumulasi poin gitu. Kalau akumulasi poin itu sudah besar kan akan dipanggil orang tuanya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah terdapat guru/staf yang memantau, menegur serta memberikan sanksi terhadap pelanggar Kawasan Tanpa Rokok. Namun, pemberian sanksi hanya berlaku untuk siswa/i saja, sedangkan guru dan staf sekolah hanya di berikan teguran saja. Teknis pemantauan pada siswa yaitu ketika ada siswa/i yang dilaporkan sedang merokok, maka pihak bersangkutan langsung mendatangi tempat dimana siswa/i itu sedang merokok, kemudian menegur secara langsung dan di arahkan ke ruang kesiswaan, setelah itu di catat oleh kesiswaan dan diberikan edukasi atau konseling oleh pihak BK. Jika

siswa/i tersebut mengulangi aktivitas merokoknya dalam jumlah yang sudah ditentukan yaitu sudah lebih dari 100 poin, maka dilakukan pemanggilan orang tua dan dilakukan perjanjian di atas materai.

Hal diatas juga diperkuat dengan temuan hasil telaah dokumen, yang membuktikan hal itu memang benar adanya. Dokumen yang ditelaah dalam aspek ini yaitu tata tertib. Ditemukan bahwa memang terdapat sanksi bagi siswa yang merokok.

- 1) Sanksi jika membawa rokok, menyimpan rokok di lingkungan sekolah (20 dan 25 poin pelanggaran) yaitu panggilan orang tua oleh Guru BK (Bimbingan Konseling).
- 2) Sanksi jika menghisap rokok di lingkungan sekolah (30 dan 50 poin pelanggaran) yaitu membuat surat pernyataan di atas materai ditandatangani oleh siswa, orang tua, wali kelas, dan guru BK (Bimbingan Konseling)

Untuk aspek wewenang selanjutnya yaitu ada tidaknya guru/staf yang ditugaskan untuk mencatat pelanggaran terhadap Kawasan Tanpa Rokok.

Hasil wawancara kepada guru BK, didapatkan bahwa ada guru/staf yang ditugaskan untuk mencatat pelanggar Kawasan Tanpa Rokok yaitu kesiswaan. Hal tersebut ditambahkan oleh keterangan dari kepala UKS bahwa selain kesiswaan, pencatatan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok juga dibantu oleh OSIS. Namun ditemukan juga bahwa pencatatan Kawasan Tanpa Rokok hanya berlaku untuk siswa saja, sedangkan pada guru yang merokok tidak dicatat.

IU1 : “Untuk siswanya sendiri iya, itu dicatat, biasanya oleh kesiswaan itu kan ada poin-poinnya, maksimal 100 poin....”  
IU2 : “....kesiswaan di bantu oleh OSIS.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat guru/staf yang ditugaskan untuk mencatat pelanggaran terhadap Kawasan Tanpa Rokok.

Hal diatas juga diperkuat dengan temuan hasil telaah dokumen, yang membuktikan hal itu memang benar adanya. Dokumen yang ditelaah dalam aspek ini yaitu catatan pelanggaran siswa. Ditemukan bahwa memang terdapat pencatatan bagi siswa yang merokok.

Terdapat catatan pelanggaran siswa di SMAN 2 Majalengka, yang dimana didalamnya salah satu pelanggaran yang tercantum itu yakni terdapat 5 orang siswa yang merokok di sekolah dalam periode atau tahun ajaran 2022/2023.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari kedua aspek wewenang tersebut sudah baik namun belum maksimal, karena belum hanya diberlakukan pada siswa saja tidak menyeluruh pada sasaran.

#### d. Fasilitas

Fasilitas yang diteliti dalam penelitian ini berupa ada tidaknya media-media atau tanda larangan merokok yang dipasang di sekitar lingkungan sekolah.

Hasil wawancara kepada guru BK, kepala UKS dan wali kelas, didapatkan bahwa terdapat media atau tanda larangan merokok yang dipasang di sekitar lingkungan sekolah yaitu berupa pamflet yang di

*print out*, dan tata tertib/papan Sekolah Ramah Anak (SRA).

IU1 : “Ada. Beberapa kali juga kita sempat *print out* ya ....”  
 IU2 : “...Pernah, terkait dengan SRA juga itu kan program yang dianjurkan untuk sekolah banyak sekali yaa jadi banyak yang beririsan.”  
 IU3 : “Ada, dulu *mah* (itu) di depan ruang guru ya, karena tempat kita berkumpul disitu.”  
 IT5 : “...pernah liat di tata tertib SMA 2 yang di pajang di dekat ruang TU....”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa aspek fasilitas dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 2 Majalengka ini sudah baik. Hal tersebut juga diperkuat dengan temuan hasil observasi, bahwa ditemukan adanya 3 tanda larangan merokok yang terletak di pos Satpam, di dekat ruang TU dan wakasek, serta di dekat toilet siswa/i. Selain itu, ditemukan kertas bertuliskan Kawasan Tanpa Rokok yang *print out* di laminating, lalu di tempel di depan ruang guru.



**Gambar 4.1 Media/Tanda Larangan Merokok dan KTR**

e. Pendanaan

Pendanaan yang diteliti dalam penelitian ini ada dua aspek yaitu dana khusus untuk program Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 2 Majalengka dan dana insentif bagi pelaksana Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 2 Majalengka.

Hasil wawancara kepada wakil kepala sekolah, informan menyatakan bahwa tidak terdapat dana khusus sekolah dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Hal tersebut pun didukung oleh penjelasan dari informan lainnya yaitu dari pihak guru-guru.

IK1 : “Tidak, karena terlalu kompleks ya itu.”  
 IU1 : “....setau Bapak nggak ada.”  
 IU2 : “Tidak ada.”  
 IU3 : “....sepertinya tidak, karena Sekolah Ramah Anak pun tidak ada dana khususnya.”

Berdasarkan jawaban dari informan dapat disimpulkan bahwa aspek dana khusus dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 2 Majalengka ini belum baik, karena belum ada.

Untuk aspek pendanaan selanjutnya yaitu dana insentif bagi pelaksana Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 2 Majalengka. Hasil wawancara kepada wakil kepala sekolah, informan menyatakan bahwa tidak terdapat dana insentif untuk tim pelaksana Kawasan Tanpa Rokok di sekolah, karena memang tim pelaksananya saja tidak ada. Hal tersebut pun didukung oleh penjelasan dari informan lainnya yaitu dari pihak guru-guru.

IK1 : “Tidak ada neng.”  
 IU1 : “Nggak yah kayaknya, belum ada neng. Harus

dipikirkan dulu ya.”  
 IU2 : “Tidak ada. Termasuk untuk kesiswaan juga tidak ada.”  
 IU3 : “....setau Ibu ya tidak ada itu”

Berdasarkan jawaban dari informan dapat disimpulkan bahwa aspek dana insentif untuk tim pelaksana implementasi Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 2 Majalengka ini belum baik, karena belum ada.

### 3. Disposisi

#### a. Efek Disposisi

Efek disposisi yang diteliti dalam penelitian ini berupa ada tidaknya evaluasi yang dilakukan secara berkala mengenai kebijakan Kawasan tanpa Rokok yang telah dilaksanakan oleh sekolah.

Hasil wawancara kepada wakil kepala sekolah, informan menyatakan bahwa sejauh ini belum ada evaluasi khusus untuk Kawasan tanpa Rokok saja, namun masih di satukan dengan program Sekolah Ramah Anak.

IK1 : “Kalau khusus KTR tidak, paling disatukan dengan Sekolah Ramah Anak, menyeluruh, tapi pembahasannya hanya sedikit saja.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek efek disposisi untuk implementasi Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 2 Majalengka ini belum baik, karena evaluasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok tidak dilakukan secara khusus dan eksplisit, dan tidak ditemukan dokumen hasil evaluasi yang mendukung adanya pelaksanaan evaluasi Kawasan Tanpa Rokok itu.

#### b. Pengaturan Birokrasi

Pengaturan Birokrasi yang diteliti dalam penelitian ini berupa ada tidaknya satuan tugas Kawasan Tanpa Rokok yang telah diatur tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah.

Hasil wawancara kepada wakil kepala sekolah, informan menyatakan bahwa belum ada atau belum dibentuk satuan tugas Kawasan Tanpa Rokok di sekolah, sehingga tidak ada pengaturan tugas pokok dan fungsi lebih lanjut. Hal tersebut pun didukung oleh penjelasan dari informan lainnya yaitu dari pihak guru-guru.

IK1 : “Belum ada, belum.” IU1 : “Tidak ada neng.” IU2 : “Tidak ada.” IU3 : “Setau Ibu tidak ada neng.”
---

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek pengaturan birokrasi untuk implementasi Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 2 Majalengka ini belum baik, karena belum dibentuk Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok, apalagi untuk pengaturan tugasnya.

### 4. Struktur Birokrasi

#### a. SOP

SOP yang diteliti dalam penelitian ini berupa ada tidaknya SOP atau peraturan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 2 Majalengka.

Hasil wawancara kepada wakil kepala sekolah, didapatkan bahwa belum ada SOP atau peraturan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, hanya ada dengan tata tertib sekolah dan etika pegawai negeri saja.. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan dari guru BK.

IK1 : “Belum. Tapi disatukannya dengan tata tertib sekolah dan etika pegawai negeri di sini.” IU1 : “...tidak sampai ada peraturan khusus gitu biasanya masuk ke dalam peraturan ketertiban, disiplin pegawai juga.....”
---

Setelah dilakukan telaah dokumen pada tata tertib siswa dan tata tertib guru, didalamnya hanya terdapat larangan untuk merokok saja, bukan pedoman atau tata cara pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek SOP untuk implementasi Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 2 Majalengka ini belum baik, karena belum dibuat SOP atau peraturan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

b. Melakukan Fragmentasi

Melakukan fragmentasi yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 2 aspek yaitu berupa ada tidaknya pelaporan hasil pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 2 Majalengka kepada puskesmas setempat dan pembagian tugas dan tanggung jawab baik dari sekolah maupun instansi kesehatan terkait dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 2 Majalengka..

Hasil wawancara kepada wakil kepala sekolah, didapatkan bahwa tidak ada pelaporan hasil pengawasan Kawasan Tanpa Rokok kepada puskesmas setempat, karena dari pihak Puskesmas pun tidak mengkoordinir pelaporan ini.

IK1 : “Belum dan nggak diminta dari Puskesmas juga kalau mengenai KTR mah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek pelaporan hasil pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 2 Majalengka kepada puskesmas setempat masih belum baik, karena tidak terdapat hal tersebut.

Untuk aspek melakukan fragmentasi selanjutnya yaitu adanya pengetahuan informan terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan wawancara kepada seluruh informan, didapatkan hasil bahwa tidak terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab baik dari sekolah maupun instansi kesehatan terkait dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

IK1 : “Belum juga neng.”  
 IU1 : “Belum ada.”  
 IU2 : “Tidak ada, bahkan dengan Puskesmas terkait pun.”  
 IU3 : “...sepertinya tidak ada pembagian tugas yang jelas, namun pihak puskesmas sering ke sekolah untuk mensosialisasikan program-program kesehatan lainnya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek pembagian tugas dan tanggung jawab baik dari sekolah maupun instansi kesehatan terkait dalam pelaksanaan KTR. masih belum baik, karena tidak terdapat hal tersebut.

## 5. Kondisi Lingkungan

### a. Derajat Keterlibatan Pada Penerima Program

Derajat keterlibatan pada penerima program/sasaran yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 2 aspek yaitu berkurangnya perokok di SMAN 2 Majalengka dan warga sekolah menjadi mampu menegur teman sebaya atau warga sekolah lainnya yang merokok di lingkungan sekolah.

Hasil wawancara kepada para siswa/i didapatkan bahwa masih ada saja warga sekolah yang merokok, dan perokok di lingkungan sekolah dirasa tidak berkurang.

IT2 : “Yaa kalo yang merokok mah ada aja teh.” IT5 : “....tetep gak ngaruh tuh meski ada peraturan itu juga tetep pada merokok.” IT6 : “....siswa-siswa masih banyak yang melanggar gitu, bukannya jadi efek jera, tapi malah ngelunjak gitu....” IT7 : “....setelah pulang sekolah apalagi di parkiran suka ada aja teh, banyak sih.”
---

Berdasarkan jawaban-jawaban dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek berkurangnya perokok di SMAN 2 Majalengka masih belum baik, karena masih banyak yang merokok di lingkungan sekolah.

Untuk aspek derajat keterlibatan pada penerima program/sasaran selanjutnya yaitu warga sekolah menjadi mampu menegur teman sebaya atau warga sekolah lainnya yang merokok di lingkungan sekolah. Berdasarkan wawancara kepada siswa/i, didapatkan hasil bahwa warga sekolah sudah dirasa mampu

mengambil tindakan saat melihat temannya ada yang merokok, dengan cara menegur perokok tersebut.

IT1 : “Ya paling Bapak tegur halus ya neng....”  
 IT2 : “Ya ditegur aja teh secara baik-baik, kalo itunya bandel ya terpaksa laporin aja langsung ke bagian wakasek.”  
 IT3 : “Pasti saya tegur Kak, dengan ancaman akan dilaporkan pada pihak kesiswaan.”  
 IT4 : “Paling negur dulu aja teh, terus kalo dia masih gitu di jam pelajaran apalagi, paling ngasih tau ke guru yang sedang ngajar dikelasnya.”  
 IT5 : “....Najwa bakal negur dulu, mengingatkan kalo di sekolah ini tuh emang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Kalo tetep ngelakuin itu, ya mau gak mau Najwa laporkan ke BK atau ke kesiswaan langsung.”

Berdasarkan keseluruhan jawaban dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek warga sekolah menjadi mampu menegur teman sebaya atau warga sekolah lainnya yang merokok di lingkungan sekolah. sudah sangat baik, karena warga sekolah berani mengambil tindakan kepada orang yang merokok, yaitu dengan menegur dan melaporkan langsung kepada pihak kesiswaan jika tidak mau berhenti.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari kedua aspek derajat keterlibatan pada penerima program/sasaran tersebut sudah cukup baik namun belum maksimal, karena salah satu aspek masih belum dapat dilaksanakan.

#### b. Sosio Kultural

Sosio kultural yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 3 aspek yaitu ada tidaknya iklan dan jual beli rokok, masih tercium atau tidaknya bau asap rokok dan masih ditemukan atau tidaknya puntung

rokok di sekitar lingkungan SMAN 2 Majalengka.

Hasil wawancara kepada beberapa informan yaitu wakil kepala sekolah bahwa tsekolah menolak adanya iklan atau sponsor dari produk rokok. Hal tersebut juga ditambahkan oleh keterangan dari guru BK, kepala UKS dan wali kelas bahwa pihak sekolah pun melarang adanya jual beli rokok di kantin sekolah.

IK1 : “Pasti neng. Itu dulu pernah ada yang menawarkan membiayai atau mensponsori kegiatan sekolah dari pengusaha rokok, itu kita menolak neng.”  
 IU1 : “Oh ya melarang, tidak ada di kantin.”  
 IU2 : “*Mmm*, tidak ada jual beli rokok di sekolah. Tentu saja ada larangan iklan, tidak akan ada *sales* yang berani kesini untuk menawarkan produk rokok....”  
 IU3 : “Melarang, di kantin pun tidak menjual.”

Berdasarkan jawaban informan tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek tidak adanya iklan dan jual beli rokok sudah sangat baik, karena sekolah melarang iklan dan jual beli rokok. Hal tersebut pun didukung oleh penjelasan dari informan lainnya yaitu dari pihak Satpam dan siswa/I yang tidak pernah melihat adanya iklan dan jual beli rokok di sekolah.

Hasil wawancara di atas juga diperkuat kembali dengan temuan hasil observasi, bahwa memang disekolah tidak terdapat iklan rokok dikantin dan koperasi sekolah tidak ada yang menjual rokok.

Untuk aspek sosio kultural kedua yaitu masih tercium atau tidaknya bau asap rokok di lingkungan sekolah. Berdasarkan

wawancara kepada satpam dan siswa/i, didapatkan hasil bahwa Masih tercium adanya bau asap rokok di lingkungan sekolah.

<p>IT1 : “....setiap hari mencium neng.”  IT4 : “Sering juga mencium bau rokok teh.”  IT5 : “....sering mencium bau rokok itu di baju siswa maupun di suatu ruangan gitu.”  IT6 : “....masih sedikit yang paling dominan itu di toilet ya teh....”  IT7 : “Masih kadang suka kecium gitu teh, masih.”</p>
---

Berdasarkan keseluruhan jawaban informan tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek masih tercium atau tidaknya bau asap rokok di sekolah masih belum baik, karena warga sekolah masih sering mencium adanya bau asap rokok.

Untuk aspek sosio kultural ketiga yaitu masih ditemukan atau tidaknya puntung rokok. Berdasarkan wawancara kepada Satpam dan siswa/i, didapatkan hasil bahwa masih terlihat adanya puntung rokok di lingkungan sekolah.

<p>IT1 : “Iya neng, masih suka liat.”  IT2 : “Kalo pernah nemu puntung rokok mah ya pernah.... di depan gerbang-gerbang gitu.”  IT3 : “....saya melihat 1 puntung rokok gitu Kak di selokan sekolah.”  IT4 : “....pernah lah sekali kali liat gitu teh.”  IT5 : “Najwa pernah liat, tapi kurang inget banyak atau nggak nya, di ruangan <i>security</i>.”  IT6 : “Kalau di kantor, di ruang guru, atau di pos satpam tuh ngeliatnya suka ada di asbak gitu.”  IT7 : “....masih suka ada aja tuh apalagi di gerbang.”</p>
--

Berdasarkan keseluruhan jawaban informan tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek masih terlihat adanya puntung rokok di sekolah masih belum baik, karena warga sekolah masih sering melihat

adanya puntung rokok di sekolah. Hal tersebut juga diperkuat dengan temuan hasil observasi, yang membuktikan bahwa memang masih terdapat adanya puntung rokok di beberapa titik sekolah seperti di gerbang dan pos satpam, di dekat lapangan.



**Gambar 4.2 Puntung Rokok di Lingkungan SMAN 2 Majalengka**

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari ketiga aspek sosio kultural tersebut masih belum baik, karena dua aspek masih belum dapat dilaksanakan.

## **6. Hubungan Antar Organisasi**

### **a. Hubungan Pelaksana dan Pembuat Kebijakan**

Hubungan pelaksana dan pembuat kebijakan yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 2 aspek yaitu kerja sama dan dukungan yang konsisten antara pimpinan sekolah dan staf sekolah dan kerja sama dan dukungan antara pihak sekolah dan instansi kesehatan terkait dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

Hasil wawancara kepada beberapa informan yaitu wakil kepala sekolah, guru BK, kepala UKS dan wali kelas, didapatkan bahwa sudah terdapat kerja sama dan dukungan yang konsisten antara pimpinan dan staf sekolah dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

<p>IK1 : “Iya neng, sangat baik itu.”          IU1 : “Ya insyaAllah, hanya belum maksimal saja....”          IU2 : “...Pimpinan menghargai dengan cara menyediakan tempat khusus untuk merokok, itu kan bentuk kerja sama juga ya....”          IU3 : “Iya neng, soalnya pimpinan sekolah selalu mengingatkan ya untuk tidak merokok....”</p>
---

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa aspek kerja sama dan dukungan yang konsisten antara pimpinan sekolah dan staf sekolah dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok sudah baik, karena pimpinan selalu mengingatkan untuk tidak merokok.

Untuk aspek hubungan pelaksana dan pembuat kebijakan selanjutnya yaitu kerja sama dan dukungan antara pihak sekolah dan instansi kesehatan terkait dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan wawancara kepada guru BK dan kepala UKS, didapatkan hasil bahwa kebanyakan informan menjawab bahwa belum terdapat kerja sama dan dukungan antara pihak sekolah dan instansi kesehatan terkait dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

<p>IU1 : “Ya belum mungkin ya neng informasi seperti itu, paling dibidang lain, bukan KTR ini.”          IU2 : “Kerja sama tidak untuk KTR saja ya, jadi kalau khusus untuk itu nggak ya. Belum ada.”</p>
---

Hasil wawancara pada pihak guru, menunjukkan bahwa belum ada kerja sama dan dukungan yang konsisten antara pihak sekolah dan instansi kesehatan terkait, karena belum adanya informasi secara detail dan terstruktur mengenai pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dari pihak instansi kesehatan. Hal tersebut pun didukung oleh penjelasan dari informan lainnya yaitu dari pihak Satpam dan siswa/i yang tidak pernah merasa pernah mendapatkan sosialisasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok langsung dari pihak instansi kesehatan terkait.

IT1 : “Kalau dari puskesmas kurang tau ya neng sepertinya nggak ada....” IT2 : “....sosialisasi dari puskesmas, instansi kesehatan kayak gitu mah, nggak deh belum pernah ....” IT3 : “Sejauh ini belum pernah sih Kak.” IT5 : “Kalo sosialisasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok, Najwa rasa belum ada....” IT6 : “....belum pernah mendapatkan sosialisasi khususnya dari puskesmas ataupun dinas....” IT7 : “Kayaknya belum pernah deh teh, kayaknya belum pernah bahas yang rokok-rokok kayak gitu.”
---

Berdasarkan keseluruhan jawaban informan dapat disimpulkan bahwa aspek kerja sama dan dukungan antara pihak sekolah dan instansi kesehatan terkait dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok masih belum baik, karena warga sekolah belum bersinggungan langsung dengan instansi kesehatan khusus untuk program Kawasan Tanpa Rokok ini.